https: www.ejurnal.stikpmedan.ac.id
Vol. 8 No. 2, 14 April 2026
e-ISSN LIPI: 2622-7290

JURNAL ILMIAH ILMU KOMUNIKASI COMMUNIQUE

Submit Date: 01 April 2026 Accepted Date: 13 April 2026 Published Date : 14 April 2026

Dinamika Komunikasi Antarbudaya Karo Bukan Batak (KBB) dalam Perdebatan Media Sosial

[1]Remaja Putra Barus, [2]Austin Ernst Antariksa Tumengkol

[1 2]Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Pembangunan (STIK-P) Medan
e-mail : majabarus@gmail.com

ABSTRAK

Perdebatan daring mengenai klaim identitas Karo Bukan Batak (KBB) telah mengemuka di media sosial dan menimbulkan konflik simbolik sekaligus ruang negosiasi identitas. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis pola komunikasi antarbudaya yang muncul dalam perdebatan media sosial seputar KBB. Metode yang digunakan adalah netnografi dan analisis wacana kritis (CDA) terhadap 12 thread publik terpilih di Facebook, Instagram, YouTube, dan X pada periode Januari 2023–Juli 2024. Hasil penelitian menunjukkan tiga pola utama: (1) resistensi identitas oleh kelompok KBB melalui penolakan label "Batak" dengan legitimasi bahasa, adat, dan sejarah; (2) konfrontasi simbolik dari kelompok kontra melalui reifikasi istilah "Batak" serta penggunaan pelabelan dan stereotip; dan (3) hadirnya ruang dialog multikultural terutama pada thread dengan moderasi aktif atau aktor mediatif. Dinamika ini menggambarkan bagaimana strategi akomodasi dan divergensi (Communication Accommodation Theory) serta negosiasi identitas (Identity Negotiation) dijalankan secara performatif di ruang digital, sementara affordance platform seperti algoritma dan fitur interaksi memperkuat kecenderungan polarisasi kecuali ada intervensi moderatif. Secara keseluruhan, komunikasi antarbudaya KBB di media sosial bersifat ambivalen – memperbesar potensi konflik namun sekaligus membuka peluang edukasi multikultural – dengan implikasi praktis pada desain moderasi, literasi digital, dan kebijakan dialog antar-etnis.

***Keywords**: komunikasi antarbudaya, identitas, Karo Bukan Batak, media sosial, analisis wacana kritis*

1. PENDAHULUAN

Fenomena klaim Karo Bukan Batak (KBB) telah menjadi isu publik yang menonjol di Sumatera Utara dan memicu perdebatan luas di berbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan X/Twitter. Isu ini tidak sekadar berhubungan dengan terminologi atau label etnis, melainkan menyentuh aspek fundamental identitas: klaim sejarah asal-usul, diferensiasi bahasa, perbedaan adat, serta persoalan penghargaan terhadap nama kelompok. Karena itu, komunikasi antarbudaya yang terwujud dalam perdebatan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana pertukaran informasi, melainkan juga menjadi medan pertarungan simbolik serta arena negosiasi identitas yang berlangsung secara terbuka dan masif.

Konteks ini penting, karena identitas etnis pada dasarnya tidak bersifat statis atau esensialis. Ting-Toomey (1999) menegaskan bahwa identitas budaya merupakan hasil proses negosiasi berkelanjutan melalui interaksi

https: www.ejurnal.stikpmedan.ac.id
Vol. 8 No. 2, 14 April 2026
e-ISSN LIPI: 2622-7290
JURNAL ILMIAH ILMU KOMUNIKASI COMMUNIQUE
Submit Date: 01 April 2026 Accepted Date: 13 April 2026 Published Date : 14 April 2026

antarindividu dan kelompok. Dalam ruang digital, proses ini mengalami akselerasi: narasi, simbol, dan klaim identitas beredar cepat, menjangkau audiens luas, dan diperkuat oleh logika algoritmik platform. Nasrullah (2017) menyoroti bahwa media sosial mempercepat sirkulasi representasi identitas sekaligus memperbesar potensi konflik simbolik karena lemahnya batas kontrol.

Penelitian terdahulu di Indonesia memperlihatkan relevansi fenomena ini. Situmorang (2020), misalnya, menunjukkan bahwa dalam perdebatan etnik daring, bahasa yang digunakan, simbol budaya yang ditampilkan, serta mekanisme moderasi komunitas sangat menentukan arah diskursus apakah mengarah ke polarisasi atau ke arah dialogis. Dengan demikian, perdebatan mengenai KBB dapat dibaca sebagai kelanjutan dari dinamika lebih luas: bagaimana komunitas-komunitas etnik di Indonesia menegosiasikan identitasnya dalam ruang digital yang tidak hanya memfasilitasi ekspresi, tetapi juga memperkuat segregasi opini.

Munculnya klaim KBB memunculkan sejumlah pertanyaan penelitian yang signifikan. Pertama, bagaimana pola komunikasi yang muncul: apakah lebih banyak ditandai oleh retorika agresif, konfrontatif, atau justru terbuka pada dialog? Kedua, faktor-faktor apa saja? misalnya strategi wacana, figur penguat narasi (influencer, tokoh komunitas), dan affordance platform digital yang memperkuat atau melemahkan masing-masing pola? Ketiga, implikasi praktis apa yang dapat ditarik untuk mendukung praktik moderasi diskursus publik dan pendidikan multikultural di tingkat lokal maupun nasional?

Penelitian ini dirancang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut melalui pemetaan tematik atas praktik komunikasi yang berlangsung di thread publik terkait KBB. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengungkap bagaimana identitas dinegosiasikan secara linguistik maupun simbolik, tetapi juga bagaimana komunikasi digital dapat menciptakan ruang resistensi, konfrontasi, sekaligus peluang dialog.

Secara ringkas, tujuan penelitian adalah: (1) mengidentifikasi pola wacana yang digunakan aktor pro-KBB dan kontra-KBB; (2) menganalisis strategi negosiasi identitas yang dijalankan melalui bahasa, simbol, dan retorika; serta (3) merumuskan rekomendasi praktis untuk pengelolaan percakapan daring lintas etnis di ruang digital. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat ganda: secara akademik memperkaya literatur komunikasi antarbudaya di era digital; secara praktis memberi panduan awal bagi moderator komunitas, pendidik, dan pembuat kebijakan lokal untuk mendorong terciptanya ruang dialog multikultural yang sehat.

https: www.ejurnal.stikpmedan.ac.id
Vol. 8 No. 2, 14 April 2026
e-ISSN LIPI: 2622-7290
JURNAL ILMIAH ILMU KOMUNIKASI COMMUNIQUE
Submit Date: 01 April 2026 Accepted Date: 13 April 2026 Published Date : 14 April 2026

2. Metode

a. Pendekatan dan desain

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengombinasikan netnografi (Kozinets, 2010) dan Critical Discourse Analysis/CDA (Fairclough, 1995). Netnografi dipilih karena penelitian ini berfokus pada praktik budaya dan interaksi sosial di ruang digital, khususnya media sosial. Netnografi memungkinkan peneliti menelusuri cara komunitas daring membangun, mempertahankan, atau menegosiasikan identitas melalui bahasa, simbol, serta pola partisipasi. Dengan cara ini, data tidak hanya dipahami sebagai teks individual, tetapi juga sebagai bagian dari *culture of use* yakni bagaimana sebuah komunitas berinteraksi, membangun norma, dan memproduksi makna di ruang daring. Prosedur netnografi meliputi: (1) pemilihan *field site* berupa thread publik tentang KBB; (2) pengamatan partisipatif-pasif (tanpa intervensi langsung); (3) dokumentasi percakapan (tangkapan layar, transkripsi); dan (4) pengorganisasian data tematik.

Sementara itu, CDA digunakan sebagai kerangka analitik untuk menafsirkan teks dan praktik komunikasi. CDA menekankan keterhubungan antara bahasa dengan ideologi, kuasa, dan praktik sosial. Melalui CDA, komentar atau posting yang muncul tidak hanya dipahami pada level linguistik (kata, metafora, gaya bahasa), tetapi juga pada level diskursif (strategi wacana, intertekstualitas) dan level sosial (posisi identitas, relasi kuasa, sejarah). Dengan demikian, CDA memberi instrumen kritis untuk mengkaji bagaimana narasi "Karo Bukan Batak" dimaknai, diperdebatkan, atau dilawan.

Integrasi kedua metode ini menghasilkan pendekatan yang komprehensif: netnografi berfungsi sebagai teknik pengumpulan data dan pemetaan konteks komunitas daring, sedangkan CDA menjadi perangkat analisis mendalam terhadap teks dan wacana yang dihasilkan komunitas tersebut. Kombinasi ini memungkinkan peneliti menjawab pertanyaan penelitian pada dua tingkat: (1) pola komunikasi aktual yang terjadi di ruang daring; dan (2) makna ideologis dan relasi kuasa yang terkandung dalam diskursus KBB.

b. Lokasi, periode, dan unit analisis

Studi dilaksanakan pada percakapan publik di empat platform utama: Facebook, Instagram, YouTube, dan X/Twitter, dengan periode pengumpulan data Januari 2023–Juli 2024. Unit analisis adalah thread publik yang berisi posting utama plus komentar (unit interaksi). Kriteria inklusi: thread yang topiknya eksplisit membahas "Karo", "Karo bukan Batak", atau "KBB" dan memiliki ≥ 100 komentar (engagement tinggi). Sebanyak 12 thread memenuhi kriteria dan dijadikan sampel utama.

https: www.ejurnal.stikpmedan.ac.id
Vol. 8 No. 2, 14 April 2026
e-ISSN LIPI: 2622-7290
JURNAL ILMIAH ILMU KOMUNIKASI COMMUNIQUE
Submit Date: 01 April 2026 Accepted Date: 13 April 2026 Published Date : 14 April 2026

c. Teknik pengambilan sampel

Sampling bersifat purposive diikuti theoretical sampling untuk menambah variasi frame (polemik, edukasi, mediasi). Untuk setiap thread dicatat metadata: tanggal, jenis akun (individu, komunitas, media lokal), jumlah komentar, dan indikator moderasi (ada/tidak).

d. Pengumpulan data

1. Mengarsipkan tangkapan layar (screenshot) posting dan komentar;
2. Mengekspor komentar publik bila platform mendukung;
3. Menyusun transkrip komentar signifikan;
4. Melakukan pseudonimisasi (mengganti nama akun dengan kode) dan menyensor unsur personal;
5. Menyimpan tautan dan konteks posting untuk audit trail.

e. Analisis data

Langkah analisis: open coding → axial coding → selective coding. CDA diterapkan dalam tiga tingkat: teks (pilihan leksikal, metafora, strategi argumentasi), praktik wacana (produksi-distribusi-konsumsi wacana), dan praktik sosial (konteks sejarah-politik identitas). Analisis dibantu perangkat lunak NVivo untuk manajemen kode dan analitik frekuensi, sementara interpretasi teoritik dilakukan manual.

f. Kredibilitas dan etika

Kredibilitas ditingkatkan melalui triangulasi lintas platform, peer debriefing antar-peneliti, dan audit trail. Etika: hanya konten publik digunakan; kutipan disamarkan; ujaran kebencian parah disajikan hanya sebagai ringkasan, bukan kutipan verbatim; dan pemberitahuan etika riset ke komite etik institusi (protokol internal) dilakukan.

3. Hasil Penelitian

a. Tema Utama 1 — Resistensi Identitas: Retorika "Karo itu Karo"

Dalam 10 dari 12 thread terpilih, kelompok yang mengusung narasi Karo Bukan Batak (KBB) secara konsisten menegaskan klaim otonomi etnis. Penegasan ini tidak hanya muncul sekali-sekali, tetapi hadir berulang dengan intensitas tinggi, sehingga membentuk pola komunikasi yang khas. Pola tersebut dapat dibaca sebagai bentuk resistensi identitas, yakni upaya mempertahankan dan mengafirmasi identitas etnis Karo di tengah dominasi narasi besar yang mengategorikan Karo sebagai bagian dari Batak.

Mekanisme wacana resistensi yang digunakan tampak dalam tiga bentuk utama. Pertama, legitimasi historis: komentar sering kali mengacu pada cerita leluhur, pengetahuan lokal, atau sejarah lisan keluarga yang diwariskan antargenerasi. Ungkapan seperti "Sejak kakek-nenek kami…" menunjukkan bahwa identitas Karo ditarik dari akar

https: www.ejurnal.stikpmedan.ac.id
Vol. 8 No. 2, 14 April 2026
e-ISSN LIPI: 2622-7290
JURNAL ILMIAH ILMU KOMUNIKASI COMMUNIQUE
Submit Date: 01 April 2026 Accepted Date: 13 April 2026 Published Date : 14 April 2026

genealogis yang panjang, sehingga klaim keotonomian mendapat legitimasi melalui memori kolektif. Kedua, legitimasi linguistik: aktor KBB menekankan bahwa bahasa Karo berbeda secara fonologis, kosakata, maupun struktur dari bahasa Batak Toba atau Mandailing. Bahasa, dalam konteks ini, dijadikan simbol otentisitas dan sekaligus alat pembeda (boundary marker) yang menegaskan klaim identitas. Ketiga, performansi simbolik: komunitas pro-KBB memanfaatkan affordance visual media sosial dengan mengunggah foto upacara adat Karo, ornamen budaya, dan menggunakan tagar seperti #KaroBukanBatak. Tindakan ini berfungsi untuk memperluas visibilitas klaim identitas sekaligus membangun solidaritas digital.

Contoh yang tersamarkan dapat dilihat dalam komentar A1 (akun komunitas budaya): “Sejak kakek-nenek kami, kami bicara bahasa Karo; kita berbeda. Karo ya Karo.” Kutipan ini mengandung penggunaan intensif frasa self-ascription seperti “kami” dan “kakek-nenek” yang mempertegas klaim keaslian. Metafora “warisan” juga menandai bahwa identitas Karo dipandang sebagai sesuatu yang diwariskan secara turun-temurun dan karenanya sah untuk dipertahankan.

Analisis teks mengindikasikan bahwa strategi resistensi ini berfungsi sebagai bentuk identity affirmation dalam kerangka Identity Negotiation Theory (Ting-Toomey, 1999). Identity affirmation di sini berarti tindakan menegaskan integritas identitas untuk melawan tekanan asimilasi nama. Dengan kata lain, ketika narasi dominan berupaya melebur Karo ke dalam kategori “Batak”, kelompok KBB merespons dengan memperkeras penanda berbedaannya.

Resistensi identitas semacam ini memiliki dua fungsi strategis. Di satu sisi, ia menjaga rasa harga diri (self-esteem) dan kohesi internal komunitas KBB. Di sisi lain, ia juga menciptakan jarak simbolik dengan kelompok lain, sehingga memperkuat polarisasi. Dengan demikian, resistensi identitas bukan sekadar fenomena linguistik atau retoris, tetapi juga merupakan praktik sosial-politik yang menegaskan otonomi, sekaligus memproduksi batas (boundary-making) di ruang digital.

b. Tema Utama 2 — Konfrontasi Simbolik: Reifikasi “Payung Batak” dan Gatekeeping

Jika pada tema pertama aktor pro-KBB menegaskan resistensi melalui klaim otonomi, maka pada tema kedua kelompok kontra-KBB membangun strategi diskursif yang bersifat konfrontatif. Dalam 9 dari 12 thread terpilih, akun yang menolak narasi KBB secara konsisten melakukan reifikasi istilah “Batak” sebagai payung besar etnisitas. Konfrontasi simbolik ini ditandai dengan tiga mekanisme wacana: (a) authoritative citation, yakni penggunaan referensi ilmiah atau administratif untuk memperkuat klaim; (b) reifikasi istilah, yaitu pengukuhan “Batak” sebagai kategori yang dianggap

https: www.ejurnal.stikpmedan.ac.id
Vol. 8 No. 2, 14 April 2026
e-ISSN LIPI: 2622-7290
JURNAL ILMIAH ILMU KOMUNIKASI COMMUNIQUE
Submit Date: 01 April 2026 Accepted Date: 13 April 2026 Published Date : 14 April 2026

sah dan tidak bisa digugat; serta (c) pelabelan negatif, berupa tuduhan bahwa KBB bersifat memecah belah atau menolak sejarah.

Contoh yang tersamarkan terlihat pada komentar B2 (akun media lokal): "Dalam ilmu etnografi, Karo termasuk rumpun Batak; klaim terpisah berpotensi membingungkan." Kutipan ini menunjukkan adanya klaim otoritas epistemik: aktor menempatkan dirinya sebagai juru bicara ilmu pengetahuan, sehingga menegasikan legitimasi klaim komunitas KBB. Dalam komentar lain, muncul juga labelisasi seperti "KBB itu gerakan emosional, bukan ilmiah" atau "Kalau memisahkan diri, berarti menolak sejarah bangsa." Bentuk-bentuk ujaran ini tidak hanya menyampaikan opini, tetapi juga memposisikan KBB sebagai "outgroup" yang bermasalah.

Analisis wacana memperlihatkan bahwa strategi semacam ini merupakan bentuk gatekeeping: upaya mengendalikan batas-batas identitas dengan mengklaim otoritas atas definisi. Dalam kerangka Social Identity Theory (Tajfel & Turner, 1979), tindakan ini mencerminkan usaha mempertahankan status dan superioritas ingroup, yakni kelompok yang mengidentifikasi diri dengan "Batak" sebagai kategori besar. Dengan menegaskan bahwa "Batak" adalah istilah ilmiah, kelompok kontra berusaha menjaga keutuhan identitas kolektif yang lebih luas, sekaligus mencegah fragmentasi.

Namun, konsekuensi dari strategi ini adalah munculnya face-threatening acts yang berimplikasi pada eskalasi emosional. Bagi komunitas KBB, klaim otoritatif yang mendiskreditkan identitas mereka dianggap sebagai bentuk penyangkalan eksistensi. Akibatnya, respons balik cenderung keras dan penuh muatan emosional, sehingga memperdalam polarisasi. Interaksi semacam ini memperlihatkan bahwa komunikasi antarbudaya dalam konteks KBB bukan sekadar pertukaran argumen, tetapi juga arena pertarungan kuasa antara narasi komunitas lokal dan narasi hegemonik.

Dengan demikian, konfrontasi simbolik dapat dipahami sebagai strategi mempertahankan otoritas definisional yang beroperasi di dua level sekaligus: pada level diskursif (melalui rujukan ilmiah dan istilah resmi) dan pada level sosial (melalui eksklusi simbolik terhadap klaim KBB). Sama halnya dengan resistensi identitas, strategi konfrontasi ini memperkuat polarisasi, namun melalui mekanisme berbeda: bukan melalui afirmasi diri, melainkan melalui delegitimasi pihak lain.

c. Tema Utama 3 — Strategi Akomodasi dan Divergensi Linguistik

Selain resistensi identitas dan konfrontasi simbolik, dinamika komunikasi dalam perdebatan KBB juga tercermin pada pilihan bahasa dan strategi linguistik yang digunakan para aktor. Analisis netnografi memperlihatkan adanya pola akomodasi

https: www.ejurnal.stikpmedan.ac.id
Vol. 8 No. 2, 14 April 2026
e-ISSN LIPI: 2622-7290
JURNAL ILMIAH ILMU KOMUNIKASI COMMUNIQUE
Submit Date: 01 April 2026 Accepted Date: 13 April 2026 Published Date : 14 April 2026

dan divergensi yang bergantian dimainkan, sesuai dengan tujuan komunikatif masing-masing aktor.

Pada satu sisi, akomodasi linguistik ditunjukkan melalui penggunaan bahasa Indonesia formal ketika aktor berusaha menjangkau audiens yang lebih luas atau meredakan ketegangan. Misalnya, aktor mediatif atau individu yang ingin membangun argumentasi rasional cenderung menggunakan kalimat panjang, tata bahasa baku, dan istilah netral seperti "mari kita diskusi" atau "kita hormati perbedaan". Strategi ini selaras dengan prinsip Communication Accommodation Theory (Giles, 1991), di mana konvergensi bahasa berfungsi untuk mengurangi jarak sosial, membangun solidaritas, dan memperkuat kesan inklusivitas.

Di sisi lain, divergensi linguistik muncul ketika aktor ingin menegaskan batas identitas dan memperkuat klaim eksklusifitas. Hal ini tampak dari penyelipan istilah Karo dalam kalimat, penggunaan huruf kapital (CAPS LOCK), atau penambahan emoji yang merepresentasikan identitas etnis (misalnya bendera, simbol adat). Komentar A3 yang disamarkan menegaskan: "Karo TENANG saja, tapi kami TEGAS: Karo ≠ Batak." Pola ini menampilkan penggunaan huruf kapital sebagai bentuk intensifikasi emosi, sekaligus strategi performatif untuk menegaskan perbedaan identitas.

Selain itu, ditemukan pula praktik code-switching (alih kode) yang menarik. Beberapa aktor menggunakan bahasa Karo di awal komentar untuk menandai identitas, kemudian beralih ke bahasa Indonesia agar tetap dapat dipahami oleh audiens yang lebih luas. Pola ini menunjukkan adanya negosiasi ganda: di satu sisi, bahasa Karo menandai eksklusivitas dan keotentikan; di sisi lain, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lingua franca yang memungkinkan dialog lintas etnis.

Analisis CAT memperlihatkan bahwa preferensi divergensi lebih dominan pada kelompok pro-KBB yang berorientasi pada boundary maintenance. Sementara itu, konvergensi lebih sering dilakukan oleh aktor mediatif atau individu yang ingin menurunkan eskalasi. Menariknya, strategi linguistik ini tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif: dalam thread tertentu, ketika seorang aktor menggunakan gaya divergen, komentar berikutnya cenderung mengikuti pola serupa (efek spiral of language). Sebaliknya, ketika moderator atau tokoh berpengaruh menggunakan gaya akomodatif, muncul kecenderungan pergeseran wacana ke arah yang lebih dialogis.

Dengan demikian, strategi akomodasi dan divergensi linguistik memainkan peran sentral dalam membentuk arah diskursus. Ia bukan hanya sekadar pilihan gaya bahasa, tetapi sekaligus mencerminkan strategi komunikasi antarbudaya: apakah memperlebar jarak identitas atau sebaliknya, membangun jembatan untuk koeksistensi.

https: www.ejurnal.stikpmedan.ac.id
Vol. 8 No. 2, 14 April 2026
e-ISSN LIPI: 2622-7290
JURNAL ILMIAH ILMU KOMUNIKASI COMMUNIQUE
Submit Date: 01 April 2026 Accepted Date: 13 April 2026 Published Date : 14 April 2026

d. Tema Utama 4 — Dialog Multikultural dan Aktor Mediatif

Meskipun sebagian besar percakapan daring tentang KBB diwarnai resistensi dan konfrontasi, penelitian ini menemukan adanya ruang dialog multikultural yang terbentuk secara sporadis, terutama pada thread dengan moderator aktif atau keterlibatan aktor mediatif. Dalam 4 dari 12 thread yang dianalisis, dinamika diskusi menunjukkan pergeseran dari pola argumentatif-konfliktual ke pola yang lebih dialogis.

Aktor mediatif biasanya berasal dari kalangan akademisi (misalnya dosen atau peneliti), organisasi pemuda, atau komunitas budaya yang memiliki legitimasi sosial. Mereka memanfaatkan strategi positive politeness (Brown & Levinson, 1987), seperti sapaan kekeluargaan ("saudara-saudara"), penggunaan hedging ("mungkin kita bisa melihat dari sisi lain"), dan ajakan kolaboratif ("bagaimana kalau kita bicarakan bersama?"). Misalnya, komentar M1 (akun dosen, disamarkan): "Mari kita lihat sumbernya bersama; beda nama bukan berarti musuh. Bagaimana kalau kita buat dialog offline?" Kalimat ini tidak hanya menawarkan klarifikasi, tetapi juga membuka ruang untuk interaksi tatap muka sebagai solusi alternatif.

Selain itu, strategi mediatif juga terlihat dalam bentuk reframing. Ketika perdebatan cenderung buntu karena pertentangan istilah "Batak" vs "KBB", aktor mediatif mengalihkan fokus ke nilai kebersamaan, sejarah interaksi sosial, atau kontribusi bersama etnis Karo dalam pembangunan daerah. Dengan cara ini, identitas yang tadinya diposisikan secara dikotomis dipresentasikan sebagai bagian dari shared heritage yang layak dihargai bersama.

Efektivitas strategi ini tampak dari perubahan pola interaksi. Thread yang sebelumnya dipenuhi komentar singkat bernada konfrontatif, berubah menjadi percakapan dengan pertanyaan terbuka, klarifikasi sumber, dan diskusi bernuansa reflektif. Meskipun jumlah komentar berkurang (engagement kuantitatif menurun), kualitas diskusi meningkat. Ini menunjukkan bahwa intervensi mediatif dapat menurunkan eskalasi konflik sekaligus membuka peluang dialog multikultural.

Dari perspektif teori Intercultural Competence (Chen & Starosta, 2000), aktor mediatif memperlihatkan keterampilan komunikasi antarbudaya yang meliputi kesadaran diri, empati, keterampilan komunikasi, dan sikap menghargai perbedaan. Lebih jauh, fenomena ini juga menegaskan bahwa moderasi—baik formal maupun informal—merupakan variabel penting yang menentukan arah diskursus di ruang digital. Tanpa moderasi, algoritma cenderung memperbesar konten provokatif; tetapi dengan kehadiran aktor mediatif, ruang publik digital dapat berubah menjadi arena edukatif yang menumbuhkan kesadaran multikultural.

https: www.ejurnal.stikpmedan.ac.id
Vol. 8 No. 2, 14 April 2026
e-ISSN LIPI: 2622-7290
JURNAL ILMIAH ILMU KOMUNIKASI COMMUNIQUE
Submit Date: 01 April 2026 Accepted Date: 13 April 2026 Published Date : 14 April 2026

Dengan demikian, dialog multikultural bukanlah kondisi yang muncul secara otomatis dalam perdebatan daring, melainkan hasil dari intervensi strategis aktor mediatif yang secara sadar menggeser pola komunikasi dari kompetisi identitas menuju koeksistensi. Hal ini menunjukkan bahwa ruang digital memiliki potensi bukan hanya sebagai arena konflik, tetapi juga sebagai laboratorium sosial untuk membangun keterampilan hidup berdampingan dalam keberagaman.

e. Tema Utama 5 — Peran Affordance Platform & Polarisasi Algoritmik

Dimensi lain yang tidak kalah penting dalam memahami perdebatan daring tentang KBB adalah peran media sosial itu sendiri sebagai ruang teknologi yang berperan aktif membentuk arah komunikasi. Analisis metadata dan pola interaksi menunjukkan bahwa perdebatan KBB tidak berlangsung dalam ruang hampa, melainkan dimediasi oleh affordance platform serta logika algoritmik yang mengatur visibilitas konten.

Pertama, konten provokatif lebih mudah viral. Postingan yang berisi klaim tegas—misalnya "Karo bukan Batak, titik!" atau "KBB menolak sejarah"—mendapat jumlah likes, shares, dan komentar lebih tinggi dibanding konten yang bernuansa netral. Hal ini sesuai dengan logika algoritmik yang mengutamakan engagement: semakin tinggi interaksi, semakin besar peluang konten untuk muncul di beranda pengguna lain. Akibatnya, komentar bernada konfrontatif lebih terlihat dan semakin memperkuat polarisasi.

Kedua, fragmentasi jaringan atau fenomena echo chambers tampak jelas. Aktor pro-KBB cenderung berinteraksi dalam lingkaran yang sama, memperkuat klaim resistensi identitas; sementara aktor kontra-KBB beroperasi dalam komunitas berbeda, mempertegas narasi reifikasi "Batak". Interaksi antar-kelompok relatif jarang, kecuali pada thread yang dikelola oleh media lokal atau komunitas budaya besar. Fragmentasi ini mempersempit peluang dialog lintas kelompok, karena wacana lebih sering berputar dalam lingkaran opini yang homogen.

Ketiga, moderasi platform sangat menentukan. Pada thread yang dimoderasi secara aktif—misalnya oleh admin komunitas budaya atau organisasi pemuda—konten provokatif lebih cepat disaring, komentar bernada kasar dihapus, dan diskusi diarahkan ke topik substantif. Hasilnya, meskipun volume komentar menurun, kualitas interaksi meningkat. Sebaliknya, pada thread tanpa moderasi, perdebatan cepat bergeser ke serangan personal, penggunaan stereotip, bahkan ujaran kebencian.

Keempat, fitur interaksi (share, emoji, hashtags) berfungsi sebagai penanda afiliasi. Tagar seperti #KaroBukanBatak dipakai untuk meneguhkan solidaritas

https: www.ejurnal.stikpmedan.ac.id
Vol. 8 No. 2, 14 April 2026
e-ISSN LIPI: 2622-7290
JURNAL ILMIAH ILMU KOMUNIKASI COMMUNIQUE
Submit Date: 01 April 2026 Accepted Date: 13 April 2026 Published Date : 14 April 2026

identitas, sementara emoji tertentu (api, bendera, atau simbol adat) menjadi cara ringkas untuk mengekspresikan posisi dalam perdebatan. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi tidak hanya terjadi pada level verbal, tetapi juga non-verbal yang dimediasi teknologi.

Dari perspektif teori media digital, fenomena ini mengonfirmasi pandangan bahwa platform memiliki agensi dalam membentuk dinamika wacana (Nasrullah, 2017). Artinya, eskalasi konflik maupun peluang dialog tidak hanya ditentukan oleh aktor manusia, tetapi juga oleh logika algoritmik yang bekerja di balik layar. Tanpa moderasi atau intervensi, algoritma cenderung memperbesar konten kontroversial yang memicu keterlibatan emosional, sehingga polarisasi semakin menguat.

Dengan demikian, peran affordance platform dan algoritma menjadi faktor kunci dalam memahami mengapa perdebatan KBB di media sosial cenderung berulang dalam pola yang sama: cepat viral, terfragmentasi, dan sulit berujung pada konsensus. Namun, pada saat yang sama, ruang digital juga menyediakan peluang baru: ketika ada intervensi moderatif dan literasi digital yang memadai, media sosial dapat menjadi medium pembelajaran multikultural, bukan sekadar arena pertarungan identitas.

4. Pembahasan

a. Negosiasi Identitas sebagai Arena Boundary Work

Temuan mengenai resistensi komunitas KBB memperlihatkan bagaimana proses negosiasi identitas berlangsung sebagai bentuk boundary work, yakni kerja simbolik untuk menetapkan, menegaskan, sekaligus mempertahankan batas identitas. Dalam perspektif Social Identity Theory (Tajfel & Turner, 1979), hal ini dapat dipahami sebagai upaya kelompok untuk mencapai positive distinctiveness, yaitu kebutuhan psikologis agar kelompok memiliki keunikan dan keunggulan yang membedakannya dari kelompok lain. Bagi komunitas KBB, label “Batak” dipersepsikan sebagai ancaman terhadap diferensiasi tersebut, sehingga perlu ditolak secara konsisten.

Boundary work yang dilakukan kelompok KBB tampak melalui aktivasi berbagai bentuk modal simbolik (Bourdieu, 1991) yang tersedia dalam repertoar budaya mereka. Klaim sejarah menjadi salah satu modal utama: narasi leluhur, silsilah, dan kisah kolonial digunakan untuk melegitimasi posisi Karo sebagai entitas otonom. Modal linguistik juga diaktifkan, dengan menonjolkan perbedaan fonologi dan kosakata bahasa Karo yang dianggap tidak serumpun dengan bahasa Batak Toba atau Mandailing. Selain itu, modal kultural berupa adat, ritual, dan simbol visual (foto upacara, ornamen tradisional, hingga tagar

https: www.ejurnal.stikpmedan.ac.id
Vol. 8 No. 2, 14 April 2026
e-ISSN LIPI: 2622-7290
JURNAL ILMIAH ILMU KOMUNIKASI COMMUNIQUE
Submit Date: 01 April 2026 Accepted Date: 13 April 2026 Published Date : 14 April 2026

#KaroBukanBatak) menjadi sarana memperluas jangkauan klaim ke ruang digital.

Proses ini menunjukkan bahwa negosiasi identitas tidak hanya berlangsung dalam bentuk wacana lisan, tetapi juga melalui praktik multimodal yang memanfaatkan teks, gambar, dan simbol digital. Dengan kata lain, media sosial menyediakan arena boundary work yang lebih kompleks: batas identitas dinegosiasikan secara simultan pada level linguistik (pilihan kata, gaya bahasa), kultural (simbol adat), dan teknologis (hashtag, emoji, algoritma).

Menariknya, boundary work dalam kasus KBB bersifat defensif sekaligus ofensif. Defensif karena bertujuan melindungi integritas identitas dari kategorisasi eksternal; ofensif karena secara aktif membangun wacana tandingan yang menolak narasi hegemonik tentang "Batak" sebagai payung etnis. Proses ini sejalan dengan temuan Brubaker (2004) tentang "ethnicity as a category of practice," di mana identitas tidak hanya ditetapkan dari luar, tetapi juga diproduksi melalui klaim internal yang berulang di ruang publik.

Dari sisi komunikasi antarbudaya, dinamika ini memperlihatkan bahwa negosiasi identitas bukanlah proses harmonis semata, melainkan arena kontestasi kuasa. Ketika satu kelompok menegaskan batasnya, kelompok lain merespons dengan upaya redefinisi atau peneguhan batas yang berbeda. Inilah mengapa resistensi KBB kerap memicu konfrontasi simbolik: setiap upaya boundary-making dari satu pihak dipersepsikan sebagai ancaman terhadap narasi kolektif pihak lain.

Dengan demikian, fenomena KBB dapat dipahami sebagai studi kasus tentang bagaimana komunitas minoritas digital mengaktivasi modal simbolik untuk melawan kategorisasi eksternal, sekaligus bagaimana media sosial memperbesar daya jangkau proses boundary work tersebut. Hasil ini menegaskan bahwa identitas etnis di era digital semakin bersifat dinamis, negosiatif, dan performatif, serta tidak bisa dilepaskan dari konteks platform yang memperantarainya.

b. Strategi Diskursif: Legitimasi vs Reifikasi

Hasil penelitian memperlihatkan adanya dua blok diskursif utama yang saling berhadapan dalam perdebatan daring mengenai KBB: blok legitimasi dan blok reifikasi. Kedua blok ini tidak sekadar berbeda dalam substansi klaim, tetapi juga dalam mekanisme pembenaran (justification strategies) yang mereka gunakan untuk mempertahankan posisi.

Blok legitimasi didominasi oleh aktor pro-KBB. Mekanisme yang digunakan antara lain self-ascription (penggunaan kata "kami", "leluhur kami", "bahasa kami"), narasi lokal (cerita nenek moyang, sejarah lisan), serta simbol budaya (ritual, adat, foto visual). Strategi ini berfungsi untuk membangun otoritas

https: www.ejurnal.stikpmedan.ac.id
Vol. 8 No. 2, 14 April 2026
e-ISSN LIPI: 2622-7290
JURNAL ILMIAH ILMU KOMUNIKASI COMMUNIQUE
Submit Date: 01 April 2026 Accepted Date: 13 April 2026 Published Date : 14 April 2026

dari dalam—yakni mengklaim kebenaran identitas berdasarkan pengalaman kolektif dan otentisitas komunitas. Dengan kata lain, klaim mereka mendapatkan validitas bukan karena dukungan akademik atau administrasi resmi, melainkan karena dianggap melekat pada pengalaman dan memori komunitas.

Sebaliknya, blok reifikasi didominasi oleh aktor kontra-KBB. Mekanisme pembenaran yang dipakai adalah kutipan otoritatif dari literatur etnografi, dokumen resmi negara, maupun nomenklatur administratif yang sudah mapan. Narasi "Karo bagian dari Batak" diposisikan sebagai fakta ilmiah yang tidak bisa ditolak. Strategi ini adalah bentuk reification—menjadikan kategori "Batak" seolah-olah objektif, tetap, dan universal. Dengan demikian, klaim identitas KBB dipandang sebagai penyimpangan dari definisi resmi yang sah.

Dalam perspektif Critical Discourse Analysis (CDA), pertarungan antara legitimasi dan reifikasi ini merupakan perebutan kuasa definisional. Fairclough (1995) menekankan bahwa bahasa adalah medium sekaligus arena kekuasaan: pilihan kata, intertekstualitas, dan klaim otoritas menentukan siapa yang dapat mendefinisikan realitas sosial. Pada kasus KBB, blok legitimasi memanfaatkan intertekstualitas dari sumber lokal (cerita leluhur, pengalaman adat), sementara blok reifikasi menggunakan intertekstualitas dari sumber ilmiah atau administratif (buku, arsip, regulasi).

Pertentangan ini memperlihatkan bagaimana kuasa diskursif bekerja: siapa yang berhasil mengontrol definisi ("apakah Karo bagian dari Batak atau bukan") akan memegang advantage dalam wacana publik. CDA membantu menunjukkan bahwa klaim ilmiah atau administratif tidak sepenuhnya netral, tetapi terikat pada relasi kuasa yang cenderung hegemonik; demikian pula klaim berbasis lokal tidak hanya narasi kultural, tetapi juga strategi politis untuk memperoleh pengakuan.

c. Akomodasi/Divergensi dan Manajemen Muka (Facework)

Dinamika penggunaan bahasa dalam perdebatan KBB menunjukkan bahwa pilihan linguistik tidak hanya berfungsi sebagai medium komunikasi, tetapi juga sebagai strategi sosial untuk mengelola relasi antarpartisipan. Temuan penelitian ini mengonfirmasi kerangka Communication Accommodation Theory (Giles, 1991) sekaligus menegaskan relevansi konsep facework dari Goffman (1967).

Penggunaan Bahasa Indonesia sering kali dipilih ketika aktor ingin membangun konvergensiyakni mendekatkan jarak dengan audiens lebih luas. Bahasa Indonesia dipandang sebagai lingua franca yang netral, sehingga pemilihannya berfungsi sebagai teknik manajemen muka. Dengan menggunakan bahasa yang dapat

https: www.ejurnal.stikpmedan.ac.id
Vol. 8 No. 2, 14 April 2026
e-ISSN LIPI: 2622-7290
JURNAL ILMIAH ILMU KOMUNIKASI COMMUNIQUE
Submit Date: 01 April 2026 Accepted Date: 13 April 2026 Published Date : 14 April 2026

dipahami semua pihak, aktor tidak hanya memperbesar peluang pesan diterima, tetapi juga menjaga "muka positif" (positive face) pihak lain dengan menghindari eksklusivitas. Misalnya, komentar mediatif seperti "Mari kita hormati pilihan masing-masing" menggunakan Bahasa Indonesia formal dan netral, sehingga mengurangi risiko konflik.

Sebaliknya, penggunaan bahasa Karo berfungsi sebagai bentuk divergence atau penegasan perbedaan. Divergensi linguistik ini merupakan performa identitas: dengan menyelipkan istilah, kosakata, atau ungkapan khas Karo, aktor menegaskan batas simbolik antara dirinya dengan kelompok lain. Dalam konteks facework, strategi ini dapat memperkuat muka internal (ingroup face), yakni rasa bangga dan solidaritas di antara sesama Karo. Namun, sekaligus berpotensi menciptakan ancaman muka (face threat) bagi kelompok kontra, karena dapat dipersepsikan sebagai penolakan atau eksklusi.

Eskalasi diskursus sering terjadi ketika face threat semakin tinggi, misalnya melalui pelabelan stereotip seperti "KBB memecah belah" atau "Karo tidak tahu sejarah". Ujaran semacam ini merusak muka positif kelompok KBB dan memicu respons balik yang emosional, biasanya ditandai dengan divergensi lebih keras (penggunaan CAPS LOCK, emoji identitas, atau tagar #KaroBukanBatak). Proses ini memperlihatkan bahwa konflik bukan hanya persoalan isi pesan, melainkan juga berkaitan dengan pengelolaan muka dalam interaksi antarbudaya.

Dengan demikian, pola akomodasi/divergensi dalam perdebatan KBB tidak bisa dipahami semata-mata sebagai variasi bahasa, melainkan sebagai strategi facework yang kompleks. Konvergensi melalui Bahasa Indonesia berfungsi sebagai mekanisme perlindungan muka publik dan upaya menurunkan ketegangan, sedangkan divergensi melalui Bahasa Karo berfungsi sebagai mekanisme afirmasi muka kelompok sekaligus alat boundary maintenance. Teori Goffman membantu menjelaskan mengapa perdebatan mudah mengalami eskalasi: ketika ancaman muka meningkat dan tidak dikelola dengan baik, strategi komunikasi cenderung bergeser ke arah pertahanan identitas yang lebih konfrontatif.

d. Platform Ecology: Algoritma, Moderasi, dan Quality of Discourse

Fenomena perdebatan KBB di media sosial tidak dapat dilepaskan dari ekologi platform digital yang secara aktif membentuk arah, intensitas, dan kualitas diskursus. Konsep platform ecology merujuk pada interaksi antara desain teknologis, logika algoritmik, kebijakan moderasi, serta praktik pengguna yang bersama-sama menentukan bagaimana komunikasi berlangsung (Plantin et al., 2018).

Pertama, affordance platform seperti tombol reaction, share, retweet, atau comment memberikan insentif bagi pengguna untuk memproduksi konten

https: www.ejurnal.stikpmedan.ac.id
Vol. 8 No. 2, 14 April 2026
e-ISSN LIPI: 2622-7290
JURNAL ILMIAH ILMU KOMUNIKASI COMMUNIQUE
Submit Date: 01 April 2026 Accepted Date: 13 April 2026 Published Date : 14 April 2026

yang menimbulkan respons emosional. Konten provokatif, singkat, dan penuh muatan identitas cenderung lebih cepat mendapatkan likes dan shares, sehingga algoritma kemudian mempromosikan konten tersebut lebih luas. Proses ini membentuk engagement-centric logic, yaitu logika distribusi konten yang mengutamakan interaksi kuantitatif alih-alih kualitas argumen. Akibatnya, ujaran emosional lebih sering muncul di permukaan, sementara komentar reflektif atau argumentatif tenggelam.

Kedua, algoritma personalisasi memperkuat fragmentasi jaringan. Aktor pro-KBB lebih sering terekspos pada konten pro, demikian pula kelompok kontra. Hal ini menciptakan echo chambers dan filter bubbles, di mana masing-masing kelompok lebih banyak berinteraksi dengan opini yang sejalan. Fragmentasi ini bukan hanya mempersempit peluang dialog lintas kelompok, tetapi juga meningkatkan keyakinan internal bahwa klaim identitas masing-masing bersifat mutlak.

Ketiga, kebijakan moderasi terbukti menjadi variabel penentu dalam mengarahkan trajectory diskursus. Thread dengan pinned guidelines (aturan komunitas yang jelas), penggunaan hashtag rules (misalnya melarang penggunaan tagar ofensif), serta tindakan tegas seperti removal of hate speech lebih mampu menahan laju polarisasi. Sebaliknya, thread tanpa moderasi cenderung menjadi arena flaming dengan serangan personal, stereotip, bahkan ujaran kebencian yang tidak terkendali.

Keempat, peran aktor mediatif (dosen, tokoh budaya, moderator komunitas) menunjukkan bahwa intervensi manusia dapat mengimbangi bias algoritmik. Dengan strategi seperti reframing topik, penggunaan bahasa akomodatif, dan ajakan kolaboratif, aktor mediatif berhasil mengalihkan diskursus dari jalur polarisasi menuju dialog. Meskipun interaksi kuantitatif (jumlah komentar) menurun, kualitas diskusi meningkat: lebih banyak pertanyaan terbuka, klarifikasi sumber, dan ekspresi empati.

Temuan ini memperlihatkan bahwa quality of discourse dalam perdebatan identitas daring sangat dipengaruhi oleh ekologi platform. Tanpa moderasi dan intervensi mediatif, algoritma engagement-centric cenderung memperbesar konflik. Namun, dengan kebijakan yang tepat dan aktor mediatif yang aktif, media sosial dapat berfungsi sebagai ruang pembelajaran multikultural yang produktif. Hal ini menegaskan bahwa kualitas komunikasi antarbudaya di ruang digital bukan hanya ditentukan oleh para aktor manusia, tetapi juga oleh desain teknologis dan regulasi platform yang membingkai interaksi mereka.

https: www.ejurnal.stikpmedan.ac.id
Vol. 8 No. 2, 14 April 2026
e-ISSN LIPI: 2622-7290
JURNAL ILMIAH ILMU KOMUNIKASI COMMUNIQUE
Submit Date: 01 April 2026 Accepted Date: 13 April 2026 Published Date : 14 April 2026

5. Kesimpulan, Implikasi, Keterbatasan, dan Rekomendasi

Kesimpulan

Perdebatan mengenai Karo Bukan Batak (KBB) di media sosial menampilkan tiga pola sentral dalam dinamika komunikasi antarbudaya. Pertama, munculnya resistensi identitas dari kelompok pro-KBB melalui legitimasi historis, linguistik, dan simbolik yang berfungsi sebagai afirmasi identitas kolektif. Kedua, hadirnya konfrontasi simbolik dari kelompok kontra-KBB yang mengandalkan reifikasi istilah "Batak" serta klaim otoritas epistemik sebagai bentuk gatekeeping. Ketiga, ditemukannya ruang dialog multikultural yang muncul secara terbatas melalui intervensi aktor mediatif dan kebijakan moderasi komunitas.

Arah percakapan terbukti sangat dipengaruhi oleh strategi diskursif aktor, apakah memilih akomodasi atau divergensi serta oleh tata kelola platform yang menentukan visibilitas, intensitas, dan kualitas interaksi. Dengan demikian, fenomena KBB di ruang digital memperlihatkan bahwa media sosial bersifat ambivalen: dapat memperbesar polarisasi, tetapi juga membuka peluang dialog multikultural apabila didukung literasi komunikasi, moderasi yang konsisten, dan peran aktif aktor mediatif.

Implikasi praktis

1. Moderator & Community Managers: rumuskan dan egakkan community guidelines yang menghargai self-ascription dan mencegah stereotip; gunakan tools de-escalation (warning prompts).
2. Pendidikan & Literasi: kembangkan modul literasi identitas dan digital untuk sekolah/universitas di Sumatera Utara agar warganet mampu melakukan perspective-taking.
3. Platform Designers: uji coba nudges pro-dialog (mis. slow-down prompts sebelum posting komentar emotif) dan fitur fact-checking lokal.

Keterbatasan penelitian

- Hanya menganalisis konten publik; diskursus di grup privat tidak tercakup.
- Sampel berbasis thread populer; fenomena mikro (sisi individual) memerlukan wawancara mendalam.
- Verifikasi sejarah secara arkeografis tidak dilakukan menyeluruh, butuh studi historiografi terpisah.

Agenda riset lanjutan

- Analisis komputasional: topic modelling & network analysis untuk memetakan polarisasi.
- Eksperimen terkontrol: uji efektivitas de-escalation nudges atau intervensi moderator.

https: www.ejurnal.stikpmedan.ac.id
Vol. 8 No. 2, 14 April 2026
e-ISSN LIPI: 2622-7290

JURNAL ILMIAH ILMU KOMUNIKASI COMMUNIQUE

Submit Date: 01 April 2026 Accepted Date: 13 April 2026 Published Date : 14 April 2026

Daftar Pustaka

Chen, G. M., & Starosta, W. J. (2000). Foundations of intercultural communication. Allyn & Bacon.

Fairclough, N. (1995). Critical discourse analysis: The critical study of language. Longman.

Goffman, E. (1967). Interaction ritual: Essays in face-to-face behavior. Anchor.

Giles, H. (2008). Communication accommodation theory. In W. B. Gudykunst (Ed.), Theorizing about intercultural communication (pp. xx–xx). Sage Publications.

Kozinets, R. V. (2010). Netnography: Doing ethnographic research online. Sage Publications.

Nasrullah, R. (2017). Media sosial: Perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi. Simbiosa Rekatama Media.

Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. In W. G. Austin & S. Worchel (Eds.), The social psychology of intergroup relations (pp. 33–47). Brooks/Cole.

Ting-Toomey, S. (1999). Communicating across cultures. Guilford Press.

Herring, S. C. (2004). Computer-mediated discourse analysis: An approach to researching online behavior. In S. A. Barab, R. Kling, & J. H. Gray (Eds.), Designing for virtual communities in the service of learning (pp. 338–376). Cambridge University Press.